



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN
PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 1 April 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN.

Pasal 1.

Mengesahkan Protokol Persejutan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 1 April 1998, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada yang salinan naskahaslinya dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 193

PROTOKOL

Merubah Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Penghasilan dan Kekayaan.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada, berhasrat membentuk suatu Protokol untuk merubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979 (selanjutnya disebut Persetujuan), telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

Judul dan pembukaan Persetujuan akan ditiadakan dan diganti sebagai berikut :

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada berhasrat untuk membentuk suatu Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, telah menyetujui sebagi berikut :

Pasal II

Pasal 2 (Pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini) dari Persetujuan ini ditiadakan dan diganti sebagai berikut :

Pasal 2

Pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini

Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.

Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan semua pajak-pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, atau atas unsur-unsur panghasilan, termasuk pajak yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau tak gerak, pajak atas seluruh gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan juga pajak atas apresiasi modal.

Persetujuan ini akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini khususnya;

Persetujuan ini akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, khususnya :

sepanjang mengenai Indonesia : Pajak Penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah). (selanjutnya disebut sebagai pajak Indonesia);

sepanjang mengenai Kanada: Pajak Penghasilan yang dikenakan oleh Pemerintah Kanada, (selanjutnya disebut sebagai Pajak Kanada).

Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan baik oleh Negara pihak pada Persetujuan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang ada. Pejabat berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan

akan saling memberitahukan satu dengan yang lain mengenai setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masing-masing.

Pasal III

Sub ayat 1 (a) Pasal 3 (Pengertian-pengertian Umum) dari Persetujuan ini akan diiadakan dan diganti sebagai berikut :

- (a) (i) istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya dan daerah yang berbatasan terhadap mana Republik Indonesia mempunyai hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi menurut hukum internasional;
- (ii) Istilah Kanada yang digunakan dalam pengertian geografis, berarti wilayah Kanada termasuk :
 - (A) setiap wilayah di luar lingkungan lautan Kanada, yang menurut hukum internasional dan Undang-undang Kanada merupakan satu wilayah dimana Kanada berhak menjalankan hak-hak yang menyangkut bahwa laut dan bawah tanah dan sumber daya alamnya;
 - (B) lautan dan lingkup udara diatas wilayah yang disebutkan dalam sub ayat (A) yang berhubungan dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam yang disebutkan disitu;

Pasal 3 ayat 1 (Pengertian-pengertian Umum) dari Persetujuan ini ditambahkan setelah sub ayat (h), sub ayat yang berikut (i) :

- (i) istilah lalu lintas internasional berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak pada Persetujuan lainnya.

Pasal IV

Pasal 4 ayat 1 (Domisili Fiskal) dari Persetujuan ini akan diiadakan dan digantikan besabai berikut :

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan berarti :

setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemen ataupun dasar lainnya yang sifatnya sama; dan

pemerintah Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau setiap badan atau perangkat pemerintah tersebut, bagian ketatanegaran atau yang berwenang.

Walaupun demikian, istilah tersebut tidak termasuk bentuk usaha tetap dalam pengertian sub ayat e dari ayat (3) pasal 2 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah.

Pasal V

1. Pasal 5 sub ayat 2 (h) Bentuk Usaha Tetap) dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan diganti dengan sebagai berikut :

(h) suatu tempat bangunan, suatu konstruksi, instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya yang berlangsung untuk suatu masa lebih dari 120 hari;

2. Pasal 5 sub ayat 2 (i) (Bentuk Usaha Tetap) dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan diganti sebagai berikut :

(i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawai atau orang lain (selain dengan agen yang bertindak bebas, seperti yang dimaksud ayat (6) dimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung dalam suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu masa lebih dari 120 hari dalam masa 12 bulan.

Pasal VI

1. Pasal 8 ayat 2 (Pelayaran dan Pengangkutan Udara) dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan diganti sebagai berikut :

"2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 ayat 1, laba yang diperoleh atas pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara yang dipergunakan terutama untuk pengangkutan penumpang atau barang-barang diantara tempat-tempat di satu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan ayat 1, akan berlaku juga untuk keuntungan yang diperoleh perusahaan dari keikutsertaannya dalam satu gabungan, usaha bersama atau didalam satu keagenan operasi internasional tetapi hanya sejumlah laba yang diperoleh seperti yang dialokasikan kepada peserta usaha bersamainternasional seimbang dengan sahamnya dalam operasi bersama tersebut.

Pasal VII

Pasal 10 ayat 2 (Dividen) dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan diganti sebagai berikut:

"2. Namun demikian, dividen itu dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada persetujuan dimana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik saham yang menikmati dividen adalah penduduk Negara pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi :

10 persen dari jumlah bruto dividen apabila pemilik saham yang menikmati dividen adalah perseroan yang memegang secara langsung paling sedikit 25 persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen;

15 persen dari jumlah bruto dividen dalam hal-hal lainnya.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba perseroan dari mana dividen dibayarkan."

Pasal VIII

Pasal 11 ayat 2 (Bunga) dari Persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut:

"2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima bunga adalah penduduk Negara pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.

Pasal IX

1. Pasal 12 ayat 2 (Royalti) dari Persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut :

"2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat, royalti itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila pemilik hak yang menikmati royalti adalah penduduk Negara pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto royalti.

2. Kalimat di bawah ini ditambahkan pada akhir Pasal 12 ayat 3 (Royalti) dari Persetujuan :

Namun demikian, istilah tersebut tidak meliputi pembayaran untuk pemberian jasa teknik (seperti riset atau penelitian yang berdasarkan ilmu pengetahuan, geologi atau teknik alam, kontrak di bidang teknik termasuk cetak biru yang berhubungan dengannya, dan jasa konsultasi dan pengawasan).

Pasal X

Pasal 13 ayat 2 dan 3 (Keuntungan atas Pemindahtanganan Harta) dari persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut :

"2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lain pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan jasa-jasa profesional, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

Walaupun demikian, keuntungan atas pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta gerak yang berhubungan dengan operasi kapal

laut atau pesawat udara tersebut, dapat dikenakan pajak hanya di Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

3. Keuntungan yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan atas pemindahtanganan

(a) saham-saham perseroan yang merupakan penduduk Negara pihak lain yang nilai dari pada saham tersebut berasal terutama dari harta tak gerak yang berada di Negara pihak lain tersebut; atau

(b) andil dalam suatu persekutuan, perwalian atau estat yang didirikan di bawah hukum Negara lain, yang nilainya terutama berasal dari harta tak gerak yang terletak di Negara lain tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara lain itu. Untuk maksud pada ayat ini, istilah harta tak gerak termasuk saham-saham perusahaan seperti yang disebutkan pada sub ayat (a) atau andil dalam suatu persetujuan, perwalian atau estat seperti yang disebutkan pada sub ayat (b)."

Pasal XI

Pasal 14 ayat 1 (Jasa-jasa Profesional) dari Persetujuan ini akan ditindakan dan diganti sebagai berikut :

"1. Penghasilan yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu kecuali apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya di Negara pihak lain itu untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya atau ia berada di Negara pihak lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi 120 hari dalam masa 12 bulan. Apabila ia mempunyai tempat tetap tersebut atau berada di negara pihak lainnya itu selama masa atau masa-masa tersebut di atas, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu tetapi hanya sepanjang penghasilan itu dianggap berasal dari tempat tetap tersebut atau diperoleh di Negara pihak lain itu selama masa atau masa-masa tersebut di atas."

Pasal XII

Pasal 15 ayat 2 dan 3 (Pekerjaan dalam Hubungan Kerja) dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan diganti sebagai berikut :

"2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila penerima imbalan berada di Negara pihak lainnya tidak melebihi 120 hari dalam masa 12 bulan, dan :

(a) imbalan yang diperoleh di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam masa 12 bulan tidak melebihi 5 ribu dollar Kanada (\$5,000) atau yang bernilai sama dalam rupiah, atau jumlah lain seperti yang disebutkan dan disetujui dalam surat-menyurat antara pejabat-pejabat yang berwenang Negara pihak pada Persetujuan; atau

(b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang bukan penduduk Negara pihak lainnya tersebut, dan imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lain tersebut.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena hubungan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut terkecuali imbalan tersebut diperoleh oleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya.

Pasal XIII

Pasal 18 ayat 2 (Pensiun dan Tunjangan Hari Tua) dari Persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut :

"2. Pensiun yang timbul di satu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara dimana pensiun tersebut berasal, dan menurut Undang-undang Negara tersebut. Namun dalam hal pembayaran pensiun yang periodik, selain dari pembayaran yang berdasarkan Undang-undang jaminan sosial di satu Negara pihak pada Persetujuan, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor pembayaran tersebut.

Pasal XIV

Pasal 22 (Harta Kekayaan) dari Persetujuan ini akan dihapuskan.

Pasal XV

1. Pasal 23 ayat 1 sub ayat (c) (Penghindaran Pajak Berganda) dari persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut :

"(c) Sepanjang sesuai dengan ketentuan pada persetujuan ini, penghasilan yang diperoleh penduduk Kanada dikecualikan dari pengenaan pajak di Kanada, meskipun demikian Kanada dapat memperhitungkan penghasilan yang dikecualikan dari pajak tersebut dalam penghitungan pajak yang dikenakan untuk penghasilan lainnya.

2. Pasal 23 ayat 2 (a) dan 2 (b) (Penghindaran Pajak Berganda) dari Persetujuan ini akan dihapuskan dan diganti sebagai berikut :

"(a) Indonesia. Apabila mengenakan pajak atas Penduduk Indonesia. Boleh menyertakan dalam basis terhadap mana pajak-pajak tersebut dikenakan, bagian-bagian penghasilan yang menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Kanada.

(b) Tunduk terhadap ketentuan-ketentuan sub ayat (c). Indonesia akan mengizinkan sebagai pengurangan atas pajak yang dihitung sesuai dengan sub ayat (a) suatu jumlah yang sama dengan bagian pajak penghasilan yang dimasukkan dalam dasar pajak tadi dapat dikenakan pajak di Kanada menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini bagi semua penghasilan yang merupakan dasar pajak Indonesia.

Pasal XVI

Ayat 3,4 dan 5 dibawah ini akan ditambahkan pada pasal 28 (Ketentuan-ketentuan Lain) dari Persetujuan ini sebagai berikut :

"3. Ketentuan-ketentuan Pasal 10 ayat 6 tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada setiap Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang berhubungan dengan sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lain yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, pemerintah daerahnya, perusahaan minyak negara yang bersangkutan atau setiap entitas darinya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Kanada.

4. Tidak satu halpun dalam persetujuan ini akan dianggap sebagai menghalangi satu Negara pihak pada Persetujuan untuk mengenakan pajak atas jumlah yang termasuk dalam penghasilan seorang penduduk Negara pihak pada Persetujuan yang menyangkut suatu persekutuan, perwakilan atau afiliasi asing yang dikuasai dimana seorang penduduk mempunyai kepentingan.

5. Persetujuan ini tidak berlaku bagi perseorangan, perwakilan atau persekutuan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dan haknya dimiliki atau dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih orang atau badan yang bukan merupakan penduduk Negara itu, jika jumlah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perseorangan, perwakilan atau persekutuan oleh Negara pihak itu lebih rendah dari pada jumlah pajak yang seharusnya dikenakan oleh Negara tersebut jika semua saham dari modal perseorangan atau lebih individu yang merupakan penduduk Negara tersebut.

Pasal XVII

1. BAB IV, beserta judulnya, dari Persetujuan ini akan ditiadakan dan BAB V sampai dengan VII menjadi BAB IV sampai dengan VI.

2. Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 dari Persetujuan ini menjadi Pasal 22 sampai dengan Pasal 29.

3. Kalimat "Protokol ini, ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979", pada Persetujuan akan ditiadakan.

Pasal XVIII

1. Protokol ini akan diratifikasikan dan instrumen ratifikasi akan dipertukarkan secepat mungkin.

2. Protokol ini akan berlaku saat pertukaran instrumen ratifikasi dan ketentuan-ketentuannya akan berlaku sehubungan dengan masa pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini.

3. Ketentuan ada Protokol ersetujuan yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979, akan berhenti berlaku sehubungan dengan masa pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini.

DENGAN KESAKSIAN para penandatanganan di bawah ini, yang telah memperoleh kuasa yang sah telah menandatangani Protokol ini.

Dibuat dalam rangkap dua di dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis masing-masing naskah tersebut berkekuatan sama

UNTUK PEMERINTAH
KANADA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ROTOCOL.

Amending the Convention between Republic of Indonesia and Canada the for the Avoidance of Double Taxation and the revention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital.

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income and on Capital signed at Jakarta on January 16, 1979 (hereinafter referred to as the Convention"), have agreed as follows.

Artiele I

The title and the preamble of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

"CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON IXCOME.

The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Canada desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows;

Artiele II

Article 2 (Taxes Covered of the Convention shall be deleted and replaced by the following :

"Artiele 2

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular.
 - (a) in the case of Indonesi : the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Law number 7 of 1983 as amendad), (hereinatter referred to as Indonesian tax)
 - (b) in the case of Canada the income taxes imposed by the Government of Canada, thereinafter referred to as Canadian tax).
4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed by either Contracting State alter the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notily each other of any substabial change which have been made to their respective taxation laws.

Artiele III

1. Subparagraph (a) of Article 3 (General Definitions) of the Convention shall be seleted and replaced by the following :
 - "(a) (i) the tern Indonesia comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;
 - (ii) the term Canada, used in a geographical sense, means the territory of Canada, including:
 - (A) any area beyond the territorial seas of Canada which, in accordance with international law and the laws of Canada is an area within Canada may wxercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;
 - (B) the seas and airspace above any area referred to in subparagraph (A) in respect of any activity carried on in connection with the exploration for or the exploitation of the natural resourees referred to therein;"

2. Paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) of the Convention shall be amended by adding thereto, immediately after subparagraph (h), the following subparagraph (i);

"(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except where the operation of the ship or aircraft is solely between places in the other Contracting State."

Article IV

Paragraph 1 of Article 4 (Fiscal Domicile) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. For the purposes of this Convention, the term "residen of a Contracting State" means:

(a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature; and

(b) the Government of that Contracting State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of any such government subdivision or authority.

However the term does not include a permanent establishment within the meaning of subparagraph c, of paragraph (3) of Article 2 of the Indonesian Law Number 7 of 1983 concerning income tax as amended."

Article V

1. Subparagraph 2(h) of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(h) a building site, a construction installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith where such site project or activity continues for a period of more than 120 days."

2. Subparagraph 2(i) of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 6) where the activities continue within a Contracting State for more than 120 days within any twelve month period."

Article VI

1. Paragraph 2 of Article 8 (Shipping and Air Transport) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and of Article 7 profits derived from the operation of ships or aircraft used principally to transport passengers or goods between places in a Contracting State may be taxed in that State.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to profits derived by an enterprise from its participation in a pool a joint business or in an international operating agency but only to so much of the profits so derived as is allocable to the participant in an international joint venture in proportion to its share in the joint operation."

Article VII

Paragraph 2 of Article 10 (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. However such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other State the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends:

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company on the profits out of which the dividends are paid."

Article VIII

Paragraph 2 of Article 11 (Interest) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. However such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest."

Article IX

1. Paragraph 2 of Article 12 (Royalties) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. However such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties."

2. The following sentence shall be added at the end of paragraph 3 of Article 12 (Royalties) of the Convention:

However the term does not include payments for the furnishing of technical services (such as studies or surveys of a scientific geological or technical nature engineering contracts including blueprints related thereto and consultancy and supervisory services)."

Article X

Paragraph 2 and 3 of Article 13 (Gains from the Alienation of Property) shall be deleted and replaced by the following:

"2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in that other State. However gains from the alienation of ships or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of

(a) shares of a company which is a resident of the other State the value of which shares is derived principally from immovable property situated in that other State; or

(b) an interest in a partnership trust or estate established under the law in the other State the value of which is derived principally from immovable property situated in that other State.

may be taxed in that other State. For the purposes of this paragraph the term "immovable property" includes the shares of a company referred to in subparagraph (a) or an interest in a partnership trust or estate referred to in subparagraph (b)."

Article XI

Paragraph 1 of Article 14 (Professional Services) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in any twelve month period. If he has or had such a fixed base or remains in that other Contracting State for the aforesaid period or periods the income may be taxed in

that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other Contracting State during the aforesaid period or periods."

ARTICLE XII

Paragraphs 2 and 3 of Article 15 (Dependent Personal Services) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 120 days within any twelve month period, and either:

(a) the remuneration earned in the other Contracting State within the twelve month period does not exceed five thousand Canadian dollars specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States; or

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other State and such remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State."

Article XIII

Paragraph 2 of Article 18 (Pensions and Annuities) shall be deleted and replaced by the following:

"2. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the State in which they arise and according to the law of that State. However, in the case of periodic pension payments other than payments under the social security legislation in a Contracting State the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the payment."

Article XIV

Article 22 (Capital) of the Convention shall be deleted.

Article XV

1. Subparagraph (c) of paragraph 1 of Article 23 (Elimination of Double Taxation) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(c) Where in accordance with any provision of this Convention income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income take into account the exempted income."

2. Subparagraphs 2(a) and 2(b) of Article 23 (Elimination of Double Taxation) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"(a) Indonesia when imposing tax on residents of Indonesia may include in the basis upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of this Convention may be taxed in Canada.

(b) Subject to the provisions of subparagraph (a) Indonesia shall allow as a deduction from the tax computed in conformity with subparagraph (a) an amount equal to such proportion of that tax that the income which is included in the basis of that tax and may be taxed in Canada according to the provisions of this Convention bears to the total income which forms the basis for Indonesian tax."

Article XVI

There shall be added to Article 28 (Miscellaneous Rules) of the Convention the following paragraphs 3, 4 and 5:

"3. The provisions of paragraph 6 of Article 10 shall not affect the provisions contained in any Contracts of Work and Production Sharing Contracts relating to the oil and gas sector or other mining sector negotiated by the Government of Indonesia its instrumentality its relevant state oil company or any other entity thereof with a person who is a resident of Canada.

4. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that Contracting State with respect to a partnership trust or controlled foreign affiliate in which the resident has an interest.

5. The Convention shall not apply to any company trust or partnership that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled directly or indirectly by one or more persons who are not residents of the State if the amount of the tax imposed on the income of the company trust or partnership by that State is substantially lower than the amount that would be imposed by that State if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or partnership as the case may be were beneficially owned by one or more individuals who were residents of that State."

Article XVII

1. CHAPTER IV and its title of the Convention shall be deleted and CHAPTERS V TO VII shall become CHAPTERS IV to VI

2. Articles 23 to 30 of the Convention shall become Articles 22 to 29

3. The Protocol signed at Jakarta the 16th day of January 1979 to the Convention shall be deleted.

Article XVIII

1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. The Protocol shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect in respect of taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the Protocol enters into force.

3. The provisions of the Protocol to the Convention signed at Jakarta on January 16 1979 shall cease to have effect in respect of taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized to that effect have signed this Protocol.

Done in duplicate at Jakarta this first day of April 1998 in the Indonesian English and French languages each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
CANADA

PROTOCOLE

Modifiant la Convention entre la Republique d'Indonesie et le Canada tendant a eviter les double impositions et a prevenir l'evasion fiscale en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune.

Le Gouvernement de la Republique d'Indonesie et le Gouvernement du Canada desireux de conclure un Protocole pour modifier la Convention tendant a eviter les doubles impositions et a prevenir l'evasion fiscale matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune signee a Jakarta le 16 janvier 1979 (ci-apres denommee "la Convention"), sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Le titre et le preambule de la Convention sont supprimes et remplaces par ce qui suit:

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
D'INDONESIE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA TENDANT A EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement du Canada, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu sont convenus des dispositions suivantes:"

Article II

L'article 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

"Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États Contractants quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne l'Indonésie: les impôts sur le revenu qui sont perçus en vertu du Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Loi numéro 7 de 1983, telle que modifiée), (ci-après dénommés "impôt canadien").

b) en ce qui concerne le Canada: les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés "impôt canadien").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives."

Article III

L'alinéa 1 a) de l'article 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

"a) (i) le terme "Indonésie" comprend le territoire de la République d'Indonésie tel que défini dans ses lois ainsi que les régions adjacentes à l'égard desquelles la République d'Indonésie a des droits souverains ou exerce sa juridiction conformément au droit international;

(ii) le terme "Canada" employé dans un sens géographique désigne le territoire du Canada y compris:

(A) toute region situee au-dela des mers territoriales du Canada qui, conformement au droit international et en vertu des lois du Canada, est une region a l'interieur de laquelle le Canada peut exercer des droits a l'egard du fond et du soussol de la mer et leurs ressources naturelles;

(B) les mers et l'espace aerien au-dessus de toute region visee l'ainea (A), a l'egard de toute activite poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visees;"

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 (Definitions generales) est modifie en y ajoutant immediatement apres l'ainea h) l'ainea i) suivant:

"i) Pexpression "trafie international" designe tout transport effectue par un navire ou un aeronef exploite par une entreprise d'un Etat contractant sauf losque l'exploitation du navire ou de l'aeronef se fait exclusivement entre des points situees dans l'autre Etat contractant."

Article IV

Le paragraphe 1 de l'article 4 (Domicile fiscal) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

"1. Au sens de la presente Convention, l'expression "resident d'un Etat contractant" designe:

a) toute personne qui en vertu de la legislation de cet Etat est assujettie a l'impot dans cet Etat en raison de son domicile de s residence de son siege de direction ou de tout autre critere de nature analogue; et

b) le gouvernement de cet Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales ou toute personne morale de droit public de ce gouvernement subdivision ou collectivite.

Toutefois l'expression ne comprend pas un etablissement stable au sens que lui donne l'ainea e du paragraphe (3) de l'article 2 de la Loi indonesienne numero 7 de 1983 concernant l'impot sur le revenu."

Article V

1. L'alinca 2 h) de l'article 5 (Etablissement stable) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

h) un chantier de construction ou une chaine de montage ou d'assemblage ou des activites de surveillance s'y exercent lorsque ce chantier cette chaine ou ces activites ont une durce superieure a 120 jours:"

2. L'ainea 2 i) de l'article 5 (Etablissement stable) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

"i) la prestation de services y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l'intermediaire d'un salarie ou d'une autre personne 6) lorsque les activites se poursuivent sur le territoire d'un Etat contractant pour plus de 120 jours au cours de toute periode de douze mois."

Article VI

1. Le paragraphe 4 de l'article 8 (Navigation maritime et acrienne) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

"2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l'article 7 les benefices provenannt de l'exploitation de navires ou d'aeronefs utilises principalement pour transporter des passagers ou des marchandises entre entre des points situes dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux benefices qu'une entreprise tire de sa participation a un pool a une exploitation en commun ou a un organisme international d'exploitation mais uniquement dans la mesure ou les benedices ainsi realises sent attribuables au participant dans une exploitation internationale en commu a concurrence de sa part dans l'exploitation commune."

Article VII

Le paragraphe 2 de l'article 10 (Dividendes) de la Comvention est supprime et remplace par ce qui suit:

"2. Toutefois ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la societe qui paie les dividendes est un resident et selon la legislation de cet Etat mais si le beneficiaire effectif des dividendes est un resident de l'autre Etat l'impor ainsi etabli ne peut exceder:

a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le beneficiaire effectif est une societe qui detient directement au moins 25 pour cent du capital de la societe qui paie les dividendes:

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du present paragraphe n'affectent pas l'imposition de la societe sur les benefices qui servent au paiement des dividendes."

Article VIII

Le paragraphe 2 de l'article 11 (Interets) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

"2. Toutefois ces interets sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'ou ils proviennent et selon la legislation de cet Etat mais si le beneficiaire effectif des interets est un resident de l'autre Etat l'impot ainsi etabli ne peut exceder 10 pour cent du montant brut des interets."

Article IX

1. Le paragraphe 2 de l'article 12 (Redevances) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

"2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'ou elles proviennent et selon la legislation de cet Etat mais si le beneficiaire effectif des redevances est un resident de l'autre Etat l'impot ainsi etabli ne peut exceder 10 pour cent de montant brut des redevances."

2. La phrase suivante est ajoutee a la fin du paragraphe 3 de l'article 12 (Redevances) de la Convention:

"Toutefois le terme ne comprend pas les paiements pour des services techniques (tels les etudes ou sondages de nature scientifique geologique ou technique ou les contrats d'ingenierie y compris les plans et devis s'y rapportant et les services de consultation ou de supervision)."

Article X

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 (Gains provenant de l'alienation de biens) de la Convention sont supprimes et remplaces par ce qui suit:

"2. Les gains provenant de l'alienation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un resident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession independante, y compris de tels gains provenant de l'alienation globale de cet etablissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'alienation de navires ou d'aeronefs exploites en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ou de biens mobiliers affectes a l'exploitation de tels navires ou aeronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

3. Les gains qu'un resident d'un Etat contractant tire de l'alienation:

a) d'actions d'une societe qui est un resident de l'autre Etat et dont la valeur est tiree principalement de biens immobiliers situes dans cet autre Etat ou

b) d'une participation dans une societe de personnes une fiducie ou une succession constituee en vertu de la legislation de l'autre Etat et dont la valeur est principalement tiree de biens immobiliers situes dans cet autre Etat.

sont imposables dans cet autre Etat. Au sens du present paragraphe, l'expression "biens immobiliers" comprend des actions d'une societe visee a l'alinéa a) ou une participation dans une societe de personnes une fiducie ou une succession visee a l'alinéa b)."

Article XI

Le paragraphe de l'article 14 (Professions liberales) de la Convention est supprime et remplace par ce qui suit:

1. Les revenus qu'une personne physique qui un resident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou d'autres activites de caractere independant ne sont habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activites ou ne sejourne dans cet autre Etat contractant pendant une periode ou des periodes ou des periodes excedant ou total 120 jours ou cours de toute periode de douze mois. S'il dispose ou a dispose d'une telle base fixe ou s'il demeure dans cet autre Etat contractant pendant ladite ou lesdites periodes les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais autre Etat contractant au cours de ladite ou desdites periodes."

Article XII

Les paragraphe 2 et 3 de l'article 15 (professions dependantes) de la Convention sont supprimees et remplacees par ce qui suit:

"2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 les remuneration qu'un resident d'un Etat contractant recoit au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat contractant pendant une periode ou des periodes n'excedant pas au total 120 jours au cours de toute periode de douze mois, et:

a) si les remuneration gagnees dans l'autre Etat contractant au cours de la periode de douze mois n'excedent pas cinq mille dollars canadiens (\$s 000) ou l'equivalent en rupiahs, ou tout autre montant qui est designe et accepte par echange de lettres entre les autorites competentes des Etats contractants; ou

b) si les remunerations sont payees par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un resident de l'autre Etat et si la charge de ces remunerations n'est pas supportee par un etablissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions precedentes du present article les remunerations recues ou titre d'un emploi salarie exerce a bord d'un navire ou d'un aeronef exploite en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat a moins que les remunerations ne soient recues par un resident de l'autre Etat contractant."

Article XIII

Le paragraphe 2 de l'article 18 (Pensions et rentes) de Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

"2. Les pensions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat d'ou elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des paiements."

Article XIV

L'article 22 (Fortune) de la Convention est supprimé.

Article XV

1. L'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 23 (Elimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit:

"c) Lorsque conformément à une disposition quelconque de la présente Convention des éléments de revenu qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada le Canada peut néanmoins pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenu tenir compte des revenus exempts."

2. Les alinéas 2 a) et 2 b) de l'article 23 (Elimination de la double imposition) sont supprimés et remplacés par ce qui suit:

"a) Lors de l'imposition de ses résidents l'Indonésie peut inclure dans l'assiette sur laquelle l'impôt est prélevé les éléments du revenu qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention.

b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c), l'Indonésie accorde sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa a), une déduction d'un montant égal à la fraction de cet impôt que représente les revenus compris dans l'assiette dudit impôt et imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention par rapport au total des revenus qui servent d'assiette à l'impôt Indonésien."

Article XVI

Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés à l'article 28 (Dispositions diverses) de la Convention:

"3. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 n'affectent pas les dispositions contenues dans des contrats de travail et de production partagée relatifs au secteur du pétrole et du gaz ou à d'autres secteurs miniers négociés par le Gouvernement de l'Indonésie sa personne morale de droit public sa société pétrolière d'Etat responsable ou par tout autre organisme qui lui appartient avec une personne qui est un résident du Canada.

4. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme empêchant un Etat contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet Etat à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.